

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Nasruddin^{1*}, Intan Maulida¹, Sutan Febriansyah¹

¹Universitas Bumi Persada, Lhokseumawe, Indonesia

*Correspondence: nasruddinmdaud@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang menjadi fokus kesejahteraan masyarakat, seperti pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan layanan dasar dan program pemberdayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kesejahteraan masyarakat, Pelayanan publik, Pemberdayaan ekonomi, Pemerintah desa, Pendidikan

Abstract

This research aims to understand the role of village governments in improving the welfare of rural communities in Indonesia. Using a qualitative approach and descriptive method, this research examines various aspects of the focus, such as public services, economic empowerment, education, and health. Data was collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The results show that village governments have a significant role in providing basic services and empowerment programs that improve people's quality of life. However, there are still challenges, such as a lack of active community participation and limited resources. This research is expected to provide insights for the government and stakeholders in formulating more effective policies to improve the welfare of village communities sustainably.

Keywords: Community welfare, Public services, Economic empowerment, Village government, Education

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Fokus pembangunan menekankan pada masyarakat desa, karena mereka memiliki potensi untuk memberi dampak positif pada setiap desa di Indonesia (Kharisma, 2023). Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan ini, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah desa dapat berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan

memberdayakan sumber daya lokal. Pelaksanaan kebijakan juga harus sesuai dengan standar administrasi yang berlaku dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku (Udjianto, 2021).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha baru.

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program pelatihan dan pendampingan, pemerintah desa membantu masyarakat mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan kualitas produk mereka. Bantuan modal usaha juga disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah desa. Penyediaan layanan kesehatan dasar seperti posyandu dan puskesmas desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kampanye kesehatan dan program vaksinasi menjadi bagian dari upaya pemerintah desa untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Di bidang pendidikan, pemerintah desa berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program pelatihan keterampilan juga diadakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

Dalam era modern ini, perlindungan lingkungan hidup menjadi semakin penting. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan promosi gaya hidup sehat kepada masyarakat. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun pemerintah desa memiliki berbagai peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta birokrasi yang kompleks. Menurut Tadanugi (2020), dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta, untuk mengatasi tantangan ini.

Dengan demikian, peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah krusial. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah (Permana, 2021). Melalui pelaksanaan program-program yang tepat sasaran dan partisipatif, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud secara berkelanjutan.

Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif di berbagai desa dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya aspek

keterlibatan masyarakat, dalam penelitian ini menyoroti peran pemerintah desa, tetapi kurang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pembangunan. Sedangkan aspek evaluasi kualitas pelayanan yaitu meskipun jurnal ini menyatakan bahwa pelayanan umum sudah cukup baik, tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur "cepat, tepat, akurat, dan berkualitas." Penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan kriteria evaluasi yang lebih spesifik untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Sedangkan dampak program pembangunan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa peran pembangunan belum maksimal, tetapi tidak memberikan analisis mendalam tentang dampak dari program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dampak dari program-program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan untuk memahami efektivitasnya. Namun dalam konteks sosial dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

Memahami konteks ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Sedangkan rekomendasi yang dapat ditawarkan dalam jurnal ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran pelayanan umum dan pembangunan. Namun, tidak ada strategi konkret yang diusulkan untuk mencapai peningkatan tersebut. Penelitian lebih lanjut dapat mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembangunan.

Secara keseluruhan, meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam tentang masalah yang diteliti.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dan bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek yang menjadi fokus kesejahteraan masyarakat desa seperti seperti pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini berlangsung di Desa Keude Krueng, Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian dimulai dari tahap pertama yakni perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap perencanaan kegiatan meliputi survey lokasi, persiapan penelitian dan hal hal lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian ini masyarakat dan aparat Desa Keude Krueng, Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara. Penelitian berlangsung sejak 1 hingga 30 September 2024.

Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara semiterstruktur. Observasi dilakukan untuk melihat berbagai upaya aparat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wawancara dilakukan dengan aparat desa dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mereka berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wawancara juga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi berbagai temuan dalam observasi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dipilih sesuai tema, dikelompokkan lalu dideskripsikan dalam bentuk teks.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini terlebih dahulu diawali bersama dengan tim peneliti melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Keude Krueng, Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesediaan pihak pemerintah desa dan masyarakat untuk menerima dilakukan penelitian di daerahnya. Selanjutnya kami melakukan pra penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa terkait peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan pra penelitian team di Desa Keude Krueng, Kecamatan Kutamakmur Kabupaten aceh Utara dalam rangka menggali potensi peran pemerintah didesa tersebut, terdapat beberapa permasalahan yakni pertama, kurangnya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang ada antara lain kurangnya pemahaman para pemerintah desa tentang pentingnya peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat, sementara sumber daya manusia yang ada di struktur pemerintahan Desa Keude Krueng sangat tersedia, mengingat ada beberapa aparatur desa yang berpendidikan S1 (sarjana).

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Sarinah dkk. (2019) yang menemukan sejumlah hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa. Menurut Marhaeni dkk. (2024), anggaran dalam dana desa secara signifikan memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah, meskipun tidak secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan.

Kedua, sudah dibentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang bergerak dalam bidang penyewaan lahan pertanian, namun masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan bisnis tersebut. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan keahlian aparatur desa khususnya terhadap pelaporan keuangan maupun administrasi di Desa Keude Krueng. Hal ini tentu menjadi kelemahan dalam pelaporan kegiatan bantuan dana desa dan kegiatan lainnya. Subiyakto dkk. (2022) menegaskan terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam pemberdayaan tersebut antara lain meliputi penyediaan modal, sarana dan prasarana, kelembagaan dan pelatihan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan Masyarakat desa terbagi dalam dua katagori yakni peran aparatur desa, dan pengelolaan BUMG. Peran aparat pemerintah desa tidak lepas dari kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintah menuntut adanya aparatur desa yang berkompeten dari segi pengetahuan, keterampilan, serta visioner terlebih lagi dapat merangsang partisipasi aktif dari masyarakat sehingga benar-benar masyarakat terberdayakan. Kemampuan aparat pemerintah yang mumpuni dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan, kesadaran bekerjasama, kesejahteraan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, selain pemaparan materi diikuti juga dengan tanya jawab dan diskusi. Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan diantaranya diperlukannya pelatihan laporan keuangan maupun administrasi kepada para aparatur desa yang perlu ditindaklanjuti, dijadikannya Desa Keude Krueng sebagai desa binaan dalam pengelolaan BUMG guna untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Simpulan dan Saran

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah desa perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah desa senantiasa selalu mengupdate pengetahuan dan keahliannya dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan pendampingan, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkat dengan adanya koordinasi dengan pemerintah desa mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini disambut suka cita oleh Masyarakat Desa Keude Krueng, Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara yakni dengan semangat memberikan data data yang diperlukan oleh peneliti. Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat mengetahui peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat menjalankan perannya sebagai pemerintah desa, dan untuk masyarakat semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta meningkatnya partisipasinya, untuk itu diharapkan kedepannya pemerintah desa dan masyarakat bisa sama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat di Desa Keude Krueng, Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara melalui aspek pendampingan dari pihak ketiga.

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu peran pelayanan pemerintah secara umum, masih perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kualitas pelayanan dan juga peran pemerintah desa masih perlu ditingkatkan dalam hal penetapan program pembangunan desa yang lebih sesuai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa; pembinaan dan peningkatan, memperjuangkan aspirasi kesejahteraan dan kepentingan dari masyarakat; serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran kesejahteraan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Kharisma. (2023). Analysis of Challenges and Opportunities in Strengthening Village Development Innovation for Village Community Welfare. *Journal of Islamic Economic and Business Studies*, 2(1), 6–17.
- Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., Andika, G., & Fahlevi, M. (2024). Impacts of Village Funding on Community Empowerment and Poverty in Klungkung, Bali. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 981-990.
- Permana, A. F. (2021). Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1).
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 267-277.
- Subiyakto, B., Jumriani, J., Abbas, E. W., Muhaimin, M., & Rusmaniah, R. (2022). Community economic empowerment through the existence of the thematic village. *The Innovation of Social Studies Journal*, 4(1), 01-10.

- Tadanugi, I. N. (2020). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 65-74.
- Udjianto, D., Hakim, A., Domai, T., Suryadi, S., & Hayat, H. (2021). Community development and economic welfare through the village fund policy. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 563-572.